

**RESPON PEMERINTAH CINA TERHADAP KEBIJAKAN SEAFOOD IMPORT  
MONITORING PROGRAM (SIMP) AMERIKA SERIKAT**

**Adinda Kusumawati**

Adindakusumawati944@gmail.com

**Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si**

Ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id

**Bibliografi: 4 Jurnal, 3 Buku, 7 Website**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

TelpFax.0761.6327

***Abstract***

*This study aim to explain the trade protect imposed by the United States. Technical Barriers to Trade cause barriers to exports of fishery products for China. The discussion in this study is China's response to the Seafood Import Monitoring Program policy issued by the United States.*

*This research uses data collection techniques using the Literature Study method. Protectionism theory by Friedrich List to analyze the response of the Chinese government in protecting fishery products in its country. The perspective used by the author is mercantilism which in trade countries must issue regulations to*

*The results of this indicate that China's response as a fishery exporting country seeks to meet the requirements given by the United States and provide countermeasures in the form of making the same policy. China accepted the conditions given by the United States by improving its domestic policies and making additional rules by making the same policy.*

*Keywords: Kebijakan, Perdagangan, Seafood, Regulasi Amerika Serikat*

## PENDAHULUAN

Tulisan ini akan membahas respon pemerintah Cina terhadap kebijakan *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP) yang dirancang oleh Amerika Serikat. Perdagangan internasional merupakan salah satu penggerak pertumbuhan perekonomian suatu negara. Salvatore menyatakan bahwa “perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan”. Aktifitas perdagangan internasional dapat berupa ekspor dan impor, yang mana salah satu atau kedua-duanya merupakan penggerak pertumbuhan.<sup>1</sup> Ekspor merupakan pengiriman dan penjualan barang dari dalam keluar negeri, menurut Sukirno keuntungannya adalah memperluas Pasar, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan pekerjaan. Sedangkan Impor merupakan kegiatan membeli produk dari luar negeri baik untuk keperluan atau dipasarkan dalam negeri.<sup>2</sup>

Kegiatan ekspor impor yang terjadi dewasa ini semakin beragam akibat peningkatan kebutuhan masyarakat. Terdapat komoditi ekspor yang diperdagangkan di dunia seperti minyak mentah, kopi, gas bumi, emas, hasil pertanian, perikanan, dan lain-lain. Perikanan menjadi salah satu komoditas ekspor yang potensial di pasar internasional. per 2015 nilai impor perdagangan mencapai US\$ 98.988.715, pada tahun terjadi peningkatan mencapai 2016 US\$106.854.178, dan ditahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 9 jutaan sehingga nilai impor mencapai sebesar US\$

115.814.642 , peningkatan yang signifikan terus terjadi, sehingga pada tahun 2018 nilai impor mencapai US\$ 125.271.459.<sup>3</sup>

Negara yang menjadi importir tertinggi adalah Amerika Serikat, Jepang, China, Spanyol, dan Prancis dengan pertumbuhan nilai impor pada tahun 2015-2017. Amerika Serikat merupakan negara Importir tertinggi. Kegiatan Impor di Amerika Serikat pada tahun 2015 sebesar US\$ 15.489.096, 2016 sebesar US\$ 16.366.242, dan 2017 sebesar US\$ 17.901.328. diketahui bahwa penangkapan ikan ilegal terjadi di perairan AS sebesar 10-20%. Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 20-32% berat makanan laut dari tangkapan liar yang di Impor ke AS senilai 1,3 miliar dan 2,1 miliar US\$ dari total 16,5 miliar US\$ dan berat 2,3 juta ton.<sup>4</sup>

Cina sebagai negara Importir utama perikanan Amerika Serikat diketahui mengekspor produk Ilegal terhadap produk pollock, salmon, dan cumi-cumi. Produk ilegal pollock dengan presentasi 30-45% % senilai US\$ 187.040.539. salmon 45-70% senilai US\$ 242.943.956. Cumi-cumi 10-15% senilai US\$ 159.849.675. Tingginya angka Impor ilegal menyebabkan Amerika Serikat lebih selektif dalam memantau produk perikanan yang masuk.

Terjadinya kasus masuknya barang ilegal menyebabkan Amerika Serikat harus lebih selektif terhadap produk yang masuk ke negaranya. Sistem keamanan yang memantau dan mengendalikan penangkapan produk ikan ilegal. Dalam melaksanakan keamanan pangan dari produk ilegal Amerika Serikat menerapkan aturan yang disebut *High Seas Driftnet Moratorium*

---

<sup>1</sup>Jimmy Hasoloan. Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*. Vol. 1 No.2 Hlm. 102

<sup>2</sup> Miranti Sedyaningrum, dkk. Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 34 No. 1 Hlm. 115-116

---

<sup>3</sup> International Trade Center. Diakses melalui [https://www.trademap.org/tradestat/Country\\_SelProduct\\_TS.aspx](https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx) pada 30 November 2020 Pukul 5.35 Wib.

<sup>4</sup> Ganapathi Pramod. 2014. *Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to the USA*. *Marine Police*. 48 Hlm 105

*Protection Act* yang menerapkan prosedur identifikasi dan sertifikasi untuk menangani kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) dan tangkapan sampingan dari sumber daya laut hidup yang dilindungi (PLMR) sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Moratorium Penangkapan Ikan dengan Driftnet Laut Tinggi (Undang-Undang Perlindungan Moratorium) dan *lacey act* yang merupakan sebuah regulasi yang diterapkan terhadap larangan log ilegal di impor ke Amerika Serikat yang digunakan juga terhadap perikanan<sup>5</sup>

Cina sebagai negara importir utama perikanan Amerika Serikat diketahui mengekspor produk Ilegal terhadap produk Pollock, Salmon, dan Cumi-Cumi. Produk ilegal Pollock dengan presentasi 30-45% senilai US\$ 187.040.539. Salmon 45-70% senilai US\$ 242.943.956. Cumi-Cumi 10-15% senilai US\$ 159.849.675. Tingginya angka Impor ilegal menyebabkan Amerika Serikat lebih selektif dalam memantau produk perikanan yang masuk.

Pada tahun 2016 Amerika Serikat merancang regulasi terhadap produk perikanan yang disebut SIMP. aturan tersebut diberlakukan terhadap semua negara eksportir produk perikanan. Skema ini mengatur tiga hal utama yang pertama, pengklasifikasian 17 Spesies yang pernah tercatat sebagai hasil *Illegal Unreported Unregulated* (IUUF). Kedua, Penerapan ketelusuran dan sertifikasi tangkap bagi spesies yang berasal dari produk perikanan hasil tangkap maupun budidaya. Ketiga, penyediaan rantai pasok mulai dari kapal, lokasi tangkap/budidaya, alat tangkap, proses pengangkutan, pengelolaan, sampai dengan ekspor.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid* 117

<sup>6</sup> Ingat, Skema Baru Ekspor Perikanan ke AS. Diakses melalui <http://amp.kontan.co.id/news/ingat-skema-baru-ekspor-perikanan-ka-as> pada 16 Juli 2020 Pukul 21.24 WIB.

Skema SIMP menetapkan persyaratan dan pelaporan bagi negara importir untuk memerangi masuknya produk perikanan ilegal agar tidak memasuki perdagangan AS. SIMP memberikan perlindungan ekonomi nasional Amerika Serikat, ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya laut. Sehingga para importir harus menyediakan data dari panen hingga memasuki perdagangan Amerika Serikat.<sup>7</sup> Aturan ini diberlakukan terhadap 13 Spesies Perikanan yaitu, Atlantic cod, Blue crab, Dolpjinfish, Grouper, King crab, Pacific cod, Red snapper, Tuna, Sea cucumber, Sharks, dan Albacore.

Cina merupakan produsen sekaligus pengeskor perikanan tertinggi pada tingkat global. Hal tersebut diakibatkan tingginya permintaan terhadap produk dalam negeri, karena tingginya jumlah penduduk armada laut yang mencapai 200.000 kapal. pada tahun 2014 laut lepas mendukung industri penangkapan ikan. Fenomena ini menyebabkan terjadinya gejala *overfishing*, polusi, reklamasi lahan, dan perluasan akuakultur yang berdampak pada penipisan stok ikan di perairan Cina.<sup>8</sup> Penipisan stok ikan di wilayah perairan domestik menyebabkan Cina memperluas ekspansi penangkapan ikan yang disebut DWF atau *Distant Water Fisher*. DWF menyebabkan terjadinya aktifitas *overfishing* di Afrika dan Pasifik Barat Laut. DWF yang menyebabkan pergeseran penangkapan ikan dibarengi dengan terjadinya penangkapan ilegal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> U.S. Seafood Import Monitoring Program. diakses melalui <https://www.iuufishing.noaa.gov/recommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx> pada 10 November 2020

<sup>8</sup> Industri Perikanan Cina: Status, Kebijakan dan Prospeknya. Diakses melalui <https://maritimeneews.id/industri-perikanan-cina-status-kebijakan-dan-prospeknya/> pada 18 November 2020 Pukul 14.39 Wib

<sup>9</sup> *Ibid*

Departemen luar negeri AS juga mencatat bahwa Cina adalah salah satu pelaku penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur terburuk di dunia, dengan mengabaikan tindakan pengelolaan perikanan'.<sup>10</sup> Padahal Cina merupakan pengeksport perikanan ke AS pada tahun 2013 1.764.850 US\$, tahun 2014 terjadi peningkatan ekspor senilai 2.000.004 US\$, tetapi pada tahun 2016 terjadi hal sebaliknya, yaitu penurunan yang menyebabkan nilai eksportnya menjadi 1.874.954 US\$..<sup>11</sup>

## KERANGKA TEORI

Kerangka teori digunakan untuk membantu memberikan arah dan tujuan suatu penelitian dalam menentukan konsep yang tepat untuk analisa terhadap penelitian. Perspektif, tingkat analisa, konsep dan teori akan dibahas dalam kerangka teori untuk membantu menunjang penelitian serta menjawab hipotesa penelitian agar membantu isi penelitian memiliki arah dan tepat sasaran.

Penulis menggunakan perspektif merkantilisme dalam penelitian ini, merkantilis dikenal juga dengan Nasioanalisme. Merkantilis adalah sebuah perspektif yang memperlihatkan upaya sebuah negara dalam mempertahankan kesejahteraan ekonomi suatu negara dan menciptakan rancangan kebijakan regulasi dalam perekonomian. Merkantilisme adalah sebuah upaya dalam mencapai kesatuan ekonomi dan kontrol politis. Pusat dari kebijakan dalam bidang perdagangan Internasional adalah mempertahankan kelebihan ekspor dari pada nilai Impor.

---

<sup>10</sup> The chinese Distant Water Fishing Fleet and Illegal, Unreported and unregulated fishing. Diakses melalui <https://www.futuredirections.org.au/publication/the-chinese-distant-water-fishing-fleet-and-illegal-unreported-and-unregulated-fishing/> 19 November 2020 Pukul 14.49 Wib

<sup>11</sup> International Trade Center

Merkantilis menganggap bahwa ekonomi harus mengikuti kepentingan negara agar menciptakan sebuah negara yang kuat, bahwa ekonomi digunakan untuk mengendalikan kekuasaan politik<sup>12</sup>

Giplin membagi Merkantilisme menjadi dua yaitu, Merkantilisme bertahan (benign) yaitu negara berupaya mempertahankan kepentingan nasional sebagai bentuk mempertahankan keamanan nasional. Kedua adalah merkantilisme agresif (melavolent) yang mana negara melakukan ekspansi sebagai upaya eksploitasi terhadap negara lain.<sup>13</sup>

Teori yang digunakan adalah proteksionisme. proteksionisme pertama kali dikemukakan oleh Alexander Hamilton yang kemudian dikembangkan oleh Friedrich List. ia berpendapat bahwa sebuah negara harus meningkatkan produksi didalam negeri nya sehingga negara berperan untuk memperkuat power nya dengan melakukan proteksionisme.<sup>14</sup> Tujuan dari tindakan proteksionisme adalah untuk melindungi pasar dalam negeri.

Proteksionisme merupakan upaya sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Friedrich List juga berpendapat bahwa untuk menghadapi perdagangan internasional yang liberal sebuah negara dapat meningkatkan kekuatan produktivitasnya. Negara sebagai pemilik *power* dapat membuat sebuah proteksionisme untuk melindungi perekonomian negaranya.

---

<sup>12</sup> Ummu Suryadi Bakry.2015,"Ekonomi Politik Internasional", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal:22

<sup>13</sup> Robert Jackson dan Georg Serenson, Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan Edisi Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 285

<sup>14</sup> Laode Muhammad Fathun. Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi: Studi Kasus: Proteksionisme AS Terhadap Impor Daging Kanada. *Jurnal Asia Pacific Studies*. Vol 1. No.1 Hlm.20

Proteksionisme merupakan sebuah produk kebijakan yang dibuat oleh negara. dalam hal ini dapat dilihat bahwa tindakan Amerika Serikat dalam membuat kebijakan SIMP merupakan bentuk perlindungan terhadap perekonomian didalam negerinya. Perspektif yang merkantilisme yang digunakan sebelumnya tepat untuk mengetahui penyebab Amerika Serikat menerapkan regulasinya terhadap negara Importir perikanan.

Dalam penelitian ini diperlukan penjelasan mengenai tingkat dan unit analisa yang jelas agar teori dapat dengan mudah dipahami. Tingkat analisa sangat diperlukan dalam penelitian sebagai alat untuk melihat, menjelaskan dan menganalisa sebuah fenomena dalam sebuah penelitian. Unit analisa penting karena jika tidak memperhatikan tingkat analisa maka akan terjadi dua kesalahan **yaitu *fallacy of composition* dan *fallacy of ecological***<sup>15</sup>. Tingkat analisa dalam meneliti semua kemungkinan unit analisa yaitu: Individu, Kelompok, Negara Bangsa, Pengelompokan Negara-negara, dan sistem internasional.

Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara-bangsa (*nationstate*). Menurut Mohtar Mas'ood penggunaan level analisa negara bangsa, bahwa semua keputusan dan perilaku setiap negara sama ketika menghadapi masalah yang sama.<sup>16</sup> Negara adalah aktor penting dalam hubungan internasional khususnya hubungan pasar. Negara berperan penting terhadap sistem internasional dan bebas dalam menentukan kebijakan yang akan diambil. Penggunaan tingkat analisa ini lebih berfokus kepada apa yang dilakukan oleh negara dan kebijakan apa yang diambil negara untuk mencapai tujuan dan kepentingannya.

---

<sup>15</sup> Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta:LP3ES hal 37

<sup>16</sup> Ibid

## PEMBAHASAN

### 1. Motivasi Amerika Serikat Menerapkan Kebijakan SIMP

Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap negara di dunia. Amerika Serikat terletak 24 derajat Lintang Utara sampai 49 derajat Lintang Utara, kemudian 30 derajat Bujur Barat hingga 66 derajat Bujur Barat. Jika dilihat secara geografis Amerika Serikat berada di kawasan Amerika Utara yang bernama Kanada.

SIMP merupakan sebuah regulasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk perikanan yang masuk ke negaranya. peraturan tersebut mewajibkan para Importir Perikanan untuk memberikan laporan terhadap produk yang masuk ke Amerika Serikat. tetapi aturan tersebut hanya terapkan terhadap 13 produk perikanan Amerika Serikat yang rentan terhadap penangkapan ikan ilegal. Tidak dilaporkan dan tidak diatur.

Penerapan aturan tersebut disebabkan masih masuknya produk perikanan IUU ke Amerika Serikat yang menyebabkan kerugian seperti produk yang kualitasnya kurang dan merugikan perekonomian negara Amerika Serikat, dan merugikan nelayan yang mengikuti berbagai aturan yang diterapkan.

Penangkapan ikan ilegal dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan atau undang-undang secara internasional maupun nasional. Penangkapan ikan ilegal berdampak terhadap jumlah penangkapan ikan yang berlebihan dan melebihi batas biologis ikan tersebut. terdapat sebanyak 85% ikan yang ditangkap diluar batas biologisnya. Alasan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan adalah untuk menghindari persyaratan

pelaporan atau manajemen suatu negara dan menghindari pajak.

Penangkapan ikan ilegal memberikan kerugian secara ekonomi terhadap nelayan suatu negara. pasalnya nelayan tangkap liar biasanya dikenakan pajak atas setiap tangkapan ikan. sedangkan penangkapan ikan ilegal akan berdampak terhadap ketersediaan ikan dimasa depan, nelayan, dan bisnis. Yang mana bisnis tersebut membayar biaya yang lebih tinggi untuk tangkapan yang lebih rendah.

Seiring dengan kebutuhan yang semakin beragam menyebabkan jumlah ikan yang ditangkap harus dilaporkan untuk mengetahui mengenai jumlah ikan yang ditangkap. Kebijakan SIMP mengharuskan negara yang melakukan impor perdagangan untuk memberikan informasi mengenai ketelusuran ikan, sehingga jumlah dan dari mana berasal ikan tersebut ditangkap dan dibudidayakan akan diketahui. Amerika Serikat melarang terjadinya sebuah penangkapan ikan secara berlebihan untuk menjaga persediaan ikan di masa depan tetapi sayangnya hal tersebut juga diberangi oleh jumlah konsumsi terhadap ikan yang mengalami peningkatan.

Amerika Serikat telah menjadi negara pelopor dalam memastikan pengelolaan terhadap perikanan secara berkelanjutan. Amerika Serikat menerapkan beberapa program yang memantau ketelusuran dan persyaratan pelabelan terhadap produk perikanan yang masuk ke negaranya seperti US FWS Lacey Act 1900. 1970s National Program Pemeriksaan makanan laut dan negara asal pelabelan. Namun pada peraturan sebelumnya terdapat beberapa keterbatasan yang mengakibatkan pemerintah AS mengesahkan Undang-Undang Konservasi dan Pengelolaan Perikanan Magnuson Stevens (MSA) yang

diatur oleh National Oceanic and Administration Atmosfer (NOAA).<sup>17</sup>

Kebijakan SIMP diberlakukan terhadap produk perikanan yang diimpor. Jadi regulasi ini tidak berlaku terhadap nelayan dan perusahaan ikan didalam negeri sehingga para pengusaha Amerika tidak perlu memenuhi berbagai persyaratan untuk memasarkan produknya didalam negeri. Kemudian muncul pertanyaan apakah produk yang berasal dari dalam negeri kemudian dan diproses diluar negeri harus mengikuti aturan ini? Jawabannya ya, jadi semua produk yang diolah di luar Amerika Serikat meskipun produk tersebut berasal dari Amerika Serikat tetap harus mengikuti berbagai aturan yang telah diberikan melalui regulasi SIMP.<sup>18</sup>

Adanya permasalahan kesehatan pangan dan permasalahan keamanan pangan yang umumnya timbul dari perdagangan perikanan dengan demikian aturan tersebut berakhir pada ketetapan terkait pengizinan pelaporan dan pencatatan prosedur yang berkaitan dengan impor dari ikan dan produk ikan tertentu yang teridentifikasi sebagai produk yang berisiko terhadap penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU). Program ini bertujuan untuk mencegah penipuan yang terjadi disepanjang rantai pasokan makanan laut. Upaya ini disebut dengan SIMP.

Persyaratan yang berada dibawah SIMP memberikan perlindungan terhadap perekonomian nasional, ketahanan pangan global, dan keberlanjutan sumber daya laut. Data yang dikumpulkan memungkinkan spesies makanan laut dilacak dari titik masuk ke perdagangan A.S. dikembalikan ke titik panen produksi atau memverifikasi

---

<sup>17</sup> Simp versus Shrimp The Changing Dynamics of U.S. –India Shrimp Trade. Cuts International Washington DC Center

<sup>18</sup> Compliance Guide: U.S Seafood Import Monitoring Program diakses melalui <https://www.iuufishing.noaa.gov>

secara sah. Pengumpulan dokumentasi tangkapan dan pendaratan untuk spesies makanan laut, prioritas ini dilakukan melalui sistem data perdagangan Internasional, portal data tunggal pemerintah Amerika Serikat.<sup>19</sup> aturan tersebut diberlakukan terhadap 13 spesies perikanan yang rentan seperti Udang, Pauhi, Kepiting Biru, Mahi-Mahi, Kerapu, King Crab, Cod Pasifik, Ikan Kakap Merah, Timun Laut, Ikan Todak, dan Ikan Tuna.<sup>20</sup>

Pemerintah Amerika Serikat meminta para importir perikananannya untuk memberikan informasi berupa tanggal pendaratan atau pembongkaran. Selain itu informasi tersebut harus diperjelas lagi dengan memberikan informasi mengenai bentuk, jumlah dan berat saat produk dibongkar. Perusahaan juga harus menginformasikan mengenai titik pendaratan awal sebuah kapal. Selanjutnya berbagai pemrosesan ikan seperti transshipment juga harus ikut diinformasikan kepada Amerika Serikat. berbagai pemrosesan, pemrosesan ulang, dan pencampuran produk juga menjadi syarat.

kapal yang akan mengirimkan produk ke Amerika Serikat harus kapal yang tercatat sebagai importir dalam perdagangan Amerika Serikat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan izin perdagangan internasional, kemudian importer juga memberikan catatan berupa catatan mengenai rantai makanan.

## **2. Respon Pemerintah Cina Terhadap Kebijakan Simp**

Aktivitas perdagangan Produk perikanan Cina dan Amerika Serikat merupakan salah satu sektor penting terkait perekonomian antara kedua negara tersebut. Kebijakan yang diterapkan oleh Amerika

Serikat dinilai memberikan kendala terhadap beberapa negara dalam mengikuti standar yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Untuk mencegah masuknya produk perikanan IUUF ke pasar dalam negerinya, Amerika Serikat memutuskan untuk membentuk regulasi yang disebut dengan SIMP (*Sistem Import Monitoring Program*). mengenai kebijakan SIMP yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap produk perikanan, hanya 13 produk perikanan yang rentan terhadap penangkapan ilegal yang masuk kedalam regulasi.

Kejelasan terhadap alat tangkap tersebut berupa kelengkapan atribut kapal seperti nama dan bendera yang menunjukkan identitas kapal. Importir juga dituntut untuk menginformasikan alat tangkap yang digunakan dalam proses penangkapan ikan. kemudian kapal yang menangkap ikan harus memberikan bahwa memiliki izin atas penangkapan ikan tersebut.

Berbagai kepatuhan telah dilaksanakan oleh Cina tetapi masih terdapat laporan terhadap kapal Cina yang melakukan penangkapan Ikan Ilegal adapun kegiatan penangkapan ilegal tersebut seperti Penipuan Tonase Kapal, alat tangkap yang merusak, kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan didaerah terlarang, ketidak jelasan Hubungan bilateral dengan negara pesisir dan peraturan yang longgar menyebabkan para pelaku perusahaan perikanan jarak jauh mengabaikan peraturan regional dan internasional dan melakukan pemancingan IUU.<sup>21</sup>

Undang-Undang Perikanan Cina sekarang berada dibawah amandemen ke lima sejak diberlakukan pada tahun 1986. Pada kesempatan sebelumnya Cina memberikan kabar gembira bagi para pelaku pemancing jarak jauh dengan memberikan

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

---

<sup>21</sup> Hui Hui Shen dan Shoulin Huang. China's Police and Practice to Combatting IUU in Distant Water Fisheries . Vol 6. Hlm 29.

dukungan berupa keuangan dan pembebasan pajak. Dalam hal ini pemerintah Cina masih memprioritaskan perekonomian dan keamanan pangan dalam pengambilan kebijakan meskipun isu lingkungan sudah semakin mendapat perhatian. Sebagai respon pemerintah Cina terhadap regulasi SIMP ia memberikan kejelasan aturan terhadap pelanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Cina terhadap nelayannya.

VMS (Vessel Monitoring System) merupakan program pengawasan kapal. menyediakan lembaga pemantau kapal yang akurat terhadap kapal yang berpartisipasi terhadap VMS, Sistem ini juga telah mengalami peningkatan secara signifikan terhadap pengendalian pemantauan dan pengawasan kapal penangkap ikan. Beberapa negara telah memperkenalkan vms yang telah diterapkan oleh beberapa negara dan melaporkan hasil tangkapan kepada otoritas pengelolaan perikanan. VMS Juga memberikan alat yang memungkinkan negara berkembang yang memiliki kendala dalam melakukan pemantauan agar dapat berlangsung secara efektif.<sup>22</sup>

Cina mewajibkan para pemancing jarak jauhnya untuk menggunakan vms sebagai syarat untuk mengajukan syarat dalam melakukan pemancingan jarak jauh. Cina terus meningkatkan aturan agar para pelaku DWF melaksanakan vms dengan baik tanpa adanya pemalsuan dengan cara memberatkan sanksi bagi yang melakukan penipuan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan VMS. Sistem tidak dapat dimatikan oleh nahkoda atau anggota awak dan peringatan dikirim secara otomatis ketika kapal mendekati batas dan wilayah tertutup negara pantai.<sup>23</sup>

Tahun 2020 tepatnya dibulan juni kementrian Pertanian Cina memberitahukan

mengenai rencana untuk dua musim tertutup penangkapan cumi-cumi dibagian barat daya Atlantik dan Pasifik timur. Ini untuk pertama kalinya Cina melakukan penutupan terhadap nelayannya pasalnya pada masa sebelumnya belum pernah melakukan tindakan ini sehingga hal tersebut cukup mengherankan.

Cina terus melakukan upaya agar terjadi pengurangan terhadap penangkapan ikan IUU. Meskipun pada masa sebelumnya berbagai tindakan yang dilakukan oleh Cina terbilang masih belum efektif tetapi aturan yang baru direvisi oleh Cina diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan penangkapan ikan IUU yang diduga dilakukan oleh nelayan dari Cina. Cina untuk pertama kalinya secara suka rela memberlakukan musim tertutup. Yang memberi kesempatan bagi dua spesies untuk dapat bereproduksi lebih besar lagi. Adapun dua spesies tersebut adalah Cumi-Cumi Humboldt dan Cumi-Cumi Sirip Pendek Argentina.

Beberapa ahli menganggapnya sebagai langkah maju dalam pengelolaan penangkapan ikan perairan jarak jauh (DWF) Cina dan yang penting dalam melindungi industri penangkapan Cumi-Cumi. Jumlah eksploitasi Cumi-Cumi mengalami penangkapan yang tinggi dan hanya berada pada umur satu tahun dan mati setelah pemijahan yang mengakibatkan reproduksinya tidak lancar. Sehingga penutupan tersebut berdampak untuk memperbaiki sistem reproduksi spesies Cumi-Cumi.

Cina juga berupaya untuk ikut serta dalam memerangi penangkapan ikan ilegal dengan ikut serta secara aktif dalam organisasi pengelolaan perikanan internasional. Cina juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan delapan negara pantai mengenai syarat dan ketentuan mengenai akses dalam penangkapan ikan di zona ZEE negara

---

<sup>22</sup> FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries

<sup>23</sup> FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries

pantai. Sebagai bentuk keseriusan Cina dalam memerangi penangkapan IUU ia memberikan sanksi Bagi perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang dikeluarkan dari Cina akan mendapatkan Hukuman berupa Sanksi Penghapusan Subsidi dan *Blacklist*. Dan pada tahun 2017 pemerintah Cina mengeluarkan keputusan terhadap kapal yang terdaftar sebagai daftar hitam perusahaan dan kapal DWF untuk pertama kalinya. salah satu kapal yang termasuk adalah fu yuan yu leng 999. Dimana pada kapal tersebut diketahui terdapat 300 ton ikan dan 6.600 ekor Hiu dan spesies yang sudah hampir punah lainnya. Kapal tersebut berisikan 20 anggota awak kapal yang menerima hukuman satu sampai empat tahun. Pada bulan desember pemerintah Cina telah menerbitkan aturan yang lebih dalam terhadap DWF untuk meningkatkan regulasi dengan mengumumkan pembuatan sistem daftar hitam.

Sebenarnya Peraturan terkait pelarangan bagi perusahaan yang melanggar aturan telah ada sejak tahun 2003 tetapi belum diumumkan secara luas sehingga dianggap aturan tersebut belum jelas. Aturan tersebut juga belum memberi kejelasan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar peraturan. Pemerintah Cina menganggap bahwa hukuman berupa penghilangan subsidi yang diberikan terhadap pelanggar merupakan cara yang paling efektif. Meningkatnya subsidi bahan bakar antara tahun 2006 hingga tahun 2014 dari 281 juta Yuan menjadi 4,2 miliar Yuan. Sehingga dapat dipastikan bahwa tanpa subsidi bahan bakar akan banyak perusahaan DWF merugi.<sup>24</sup>

Pemerintah Amerika Serikat meminta para importir perikanannya untuk

memberikan informasi berupa tanggal pendaratan atau pembongkaran. Selain itu informasi tersebut harus diperjelas lagi dengan memberikan informasi mengenai bentuk, jumlah dan berat saat produk dibongkar. Perusahaan juga harus menginformasikan mengenai titik pendaratan awal sebuah kapal. Selanjutnya berbagai pemrosesan ikan seperti transshipment juga harus ikut diinformasikan kepada Amerika Serikat. berbagai pemrosesan, pemrosesan ulang, dan pencampuran produk juga menjadi syarat.

Amerika Serikat meminta agar para importir memberikan pelaporan terhadap produk hasil tangkapan secara detail. Cina sebagai Importir perikanan ke Amerika Serikat memenuhi berbagai persyaratan yang diminta oleh Amerika Serikat dengan memperkuat aturannya. Cina mewajibkan Para produsen perikanan untuk melaporkan produksi perikanannya dari yang awalnya dua kali dalam setahun menjadi satu kali dalam satu bulan terhadap perikanan, termasuk tangkapan, spesies utama, dan nilai produksi. untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan otoritas perikanan. Mekanisme tinjauan ahli telah diperkenalkan untuk proyek konstruksi kapal DWF. Setiap proyek konstruksi tunduk pada penilaian kelayakan oleh para ahli dan profesional. Selain itu pengawasan perikanan perairan jauh juga dijadikan sebagai implementasi utama. Sebelumnya pengawasan perikanan pertama kali dikenalkan pada tahun 2003. Tetapi dalam program penataan tata kelola perikanan peraturan tersebut kembali direvisi pada tahun 2017.<sup>25</sup>

Cina juga memperbaiki sistem pelaporan data perikanan. Sistem pelaporan data tersebut juga diawasi oleh para ahli dan profesional. Seringkali dalam pelaksanaan kegiatan menertibkan kapal terhadap penangkapan IUU dalam pengumpulan dan

---

<sup>24</sup> China Cracks Down on Illegal distant water Fishing. Diakses melalui

<https://chinadialogueocean.net/4239-china-cracks-down-on-illegal-distant-water-fishing/> pada 10 Juni 2021 Pukul 13.56 Wib

---

<sup>25</sup> Ibid Hlm 30

pelaporan data terjadi kejanggalan sehingga pemerintah Cina akan melakukan perbaikan terhadap sistem pengumpulan dan pelaporan data penangkapan ikan. Perbaikan tersebut dibarengi dengan peningkatan cakupan pengamatan.

Sistem pelaporan hierarkis telah diterapkan untuk pengumpulan data perikanan di Cina. Data produksi hasil tangkapan, spesies dan nilai produksi dari DWF dikumpulkan dan dilaporkan ke Biro Administrasi Perikanan di MARA, terutama dari perikanan cumi-cumi, tuna, makarel dan krill Antartika.

kapal yang akan mengirimkan produk ke Amerika Serikat harus kapal yang tercatat sebagai importir dalam perdagangan Amerika Serikat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan izin perdagangan internasional, kemudian importer juga memberikan catatan berupa catatan mengenai rantai makanan.

Sebagai bentuk respon pemerintah Cina terhadap kebijakan Amerika Serikat. Cina mengeluarkan aturan agar Kapal untuk menangkap ikan di laut lepas harus mengajukan izin penangkapan ikan di laut lepas tertentu sesuai dengan peraturan, yang menentukan daerah penangkapan ikan, spesies target utama dan waktu penangkapan ikan yang diizinkan serta karakteristik kapal penangkap ikan. Kapal yang diajukan harus beroperasi sesuai dengan persyaratan izin penangkapan ikan.

Cina juga mengeluarkan aturan dalam memperbaharui langkah-langkah dan pedoman khusus untuk pendaftaran kapal, penerbitan izin penangkapan kapal, dan manajemen awak kapal. Cina juga memberikan pelatihan terhadap awak kapal agar pemancingnya terlatih dan ilmu dalam pemancingan. Nahkoda dan awak kapal yang melakukan pemancingan DWF seringkali diketahui tidak memiliki ilmu dan pengalaman dalam dunia perikanan dan kelautan. Sehingga pemerintah Cina

berkomitmen untuk memastikan bahwa nelayan yang melakukan pemancingan jarak jauh adalah nelayan yang sudah memiliki kemampuan dibidang tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada kemampuan nelayan dalam memilah ikan hasil tangkapan sehingga tidak terjadi pengurangan yang berlebihan terhadap ikan. Pada september 2018 Shanghai Ocean University dan Asosiasi DWF Cina memberikan pelatihan terhadap manajer perusahaan DWF yang menjelaskan mengenai aturan badan perikanan regional dan undang-undang nasional di yurisdiksi lain.<sup>26</sup>

sebagai upaya mendukung kegiatan Amerika Serikat dalam menjaga lingkungan dan tetap mempertahankan perekonomian negaranya Cina akan berupaya meningkatkan produksi akuakultur dan memberikan aturan terhadap produk impor. Cina saat ini merubah kebijakannya yang berfokus pada peningkatan produksi makanan laut dibandingkan dengan air tawar. yang memberi perhatian luas di Cina adalah terhadap budidaya pesisir laut meskipun masih pada tahap awal. Dan akuakultur laut juga mengalami kendala seperti dampak dari industry tersebut serta konflik geopolitik yang berkaitan dengan keputusan lokasi.<sup>27</sup>

Tren masyarakat Cina dalah mengkonsumsi karnivoria laut. DWF adalah cara untuk mempertahankan ketahanan pangan di Cina tetapi Cina juga memiliki beberapa cara lain seperti melakukan produksi didalam negerinya dengan peningkatan akuakultur laut dan air tawar kemudian selanjutnya adalah melakukan investasi langsung. Dan berbagai upaya akuisisi Terjadi ketidak sesuaian antara undang-undang dan implementasi yang

<sup>26</sup> <https://chinadialogueocean.net/4239-china-cracks-down-on-illegal-distant-water-fishing/>

<sup>27</sup> China at a Crossroads: An Analysis of China's Changing Seafood Production and Consumption. Diakses melalui <https://reader.elsevier.com/>

dilakukan. Terdapat salah satu prinsip perikanan yang ingin dikembangkan oleh Cina yaitu meningkatkan produksi budidaya menjadi 75% dari keseluruhan total produksi.

Budidaya Cina biasanya menggunakan dua sistem operasi yang pertama adalah untuk perikanan ekspor yang biasanya menggunakan standar lebih tinggi mengikuti persyaratan negara pengimpor. Terdapat tren makanan ikan mewah dengan dalih jamuan bisnis kelas atas dan elit pemerintahan seperti sirip ikan hiu. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan peningkatan tingkat minat dan keterlibatan dalam peran Cina dalam perikanan global.<sup>28</sup>

Peningkatan produksi akuakultur di Cina tetapi mengalami kendala yang mana Terjadi ketidak sesuaian antara undang-undang dan implementasi yang dilakukan. Terdapat salah satu prinsip perikanan yang ingin dikembangkan oleh Cina yaitu meningkatkan produksi budidaya menjadi 75% dari keseluruhan total produksi. Wilayah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan akuakultur di Cina

Sebagai pengakuan atas tantangan lingkungan yang signifikan yang muncul sebagai tanggapan terhadap peran Cina yang berkembang pesat dalam perikanan global, reformasi sedang berlangsung berlangsung di tingkat tata kelola lingkungan pada umumnya, kebijakan perikanan dan inisiatif di antara masyarakat sipil dan pasar aktor. Dalam kebijakan formal negara, ini termasuk pengembangan berbagai peraturan baru tentang pengelolaan perikanan dan keberlanjutan kemampuan, dan penekanan pada retorika negara untuk memastikan keseimbangan antara peningkatan produksi dan kelestarian lingkungan. Di antara lembaga donor dan masyarakat sipil, terjadi peningkatan tingkat keterlibatan dengan Cina, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan sistem ketertelusuran dan

---

<sup>28</sup> Ibid

sertifikasi, dan kampanye kesadaran konsumen, seperti yang terkait dengan sirip hiu konsumsi. Namun, semua inisiatif ini tetap ditandai dengan parah kendala. Kebijakan negara tetap tunduk pada batasan penegakan hukum yang ada di seluruh tata kelola lingkungan umumnya di Cina.<sup>29</sup>

Guna menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat Cina juga akan memfilter segala bentuk impor makanan laut yang masuk kenegarannya sehingga dapat menjamin kesehatan masyarakat. Tindakan Cina ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan global Cina seperti yang sedang ramai diisukan di dunia internasional. tetapi kurangnya data yang dapat diakses dari Cina menyebabkan rencana tersebut suda dilaksanakan sesuai dengan gagasannya atau belum. Tren masyarakat Cina dalah mengkonsumsi karnivoria laut.

DWF adalah cara untuk mempertahankan ketahanan pangan di Cina tetapi Cina juga memiliki beberapa cara lain seperti melakukan produksi didalam negerinya dengan peningkatan akuakultur laut dan air tawar kemudian selanjutnya adalah melakukan investasi langsung. Budidaya Cina biasanya menggunakan dua sistem operasi yang pertama adalah untuk perikanan ekspor yang biasanya menggunakan standar lebih tinggi mengikuti persyaratan negara pengimpor. berbagai peraturan baru tentang pengelolaan perikanan dan keberlanjutan kemampuan, dan penekanan pada retorika negara untuk memastikan keseimbangan antara peningkatan produksi dan kelestarian lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Cina dan Amerika Serikat telah mengalami berbagai dinamika selama melakukan kerja sama. Tetapi hubungan antara keduanya kembali mengalami

---

<sup>29</sup> Ibid

perbaikan sehingga masih melakukan berbagai kerja sama hingga saat ini. Kerja sama yang masih berlangsung hingga saat ini adalah di sektor perikanan yang memberikan keuntungan yang besar bagi kedua negara. keduanya saling membutuhkan dalam kerja sama tersebut dimana hasil tangkapan ikan Amerika Serikat di ekspor ke Cina untuk dikelola karena rendahnya harga produksi di Cina. tetapi sempat mengalami kendala akibat terjadinya perang dagang antara keduanya.

Sektor perikanan di Amerika Serikat memiliki tingkat keamanan yang baik sebagai negara yang maju sehingga berbagai produk yang masuk harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh Amerika Serikat. regulasi yang dibuat oleh Amerika Serikat menyebabkan beberapa negara yang mengekspor produk perikanan harus memenuhi persyaratan tersebut. Amerika Serikat mengeluarkan regulasi baru untuk menjamin keamanan masyarakatnya dari produk perikanan yang berbahaya dan illegal. Amerika Serikat juga bermaksud melindungi perekonomiannya dari penangkapan ikan IUU. Sehingga meningkatkan regulasi untuk mencegah masuknya produk illegal. Produk illegal selain merugikan perekonomian suatu negara juga berdampak terhadap jumlah di laut. penangkapan berlebihan akan menyebabkan terjadinya kelangkaan suatu jenis ikan tertentu.

Kelangkaan tersebut akan menyebabkan kurangnya pemenuhan atas kebutuhan protein di dunia. Cina merupakan negara pengekspor perikanan terbesar di dunia tetapi nelayan Cina yang melakukan program DWF yang beberapa kali tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal. Sehingga adanya program tersebut menyebabkan memerlukan respon dari pemerintah Cina agar tetap dapat melakukan ekspor dengan lancar tanpa adanya hambatan yang membuatnya sulit dalam

melakukan ekspor. Cina kemudian merespon dengan mengikuti aturan yang dikeluarkan Amerika Serikat dan mengeluarkan aturan tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakry Ummu Suryadi.2015, "Ekonomi Politik Internasional", Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- chinadialogueocean.net/. 2018. *China Cracks Down on Illegal distant water Fishing*  
<https://chinadialogueocean.net/4239-china-cracks-down-on-illegal-distant-water-fishing/> <23 juni 2021 Pukul 13.52>
- Fao.org *Marine Fisheries Development in China*  
<http://www.fao.org/3/y2257e/y2257e04.htm#bm04.1.1> <diakses pada 14 Februari 2020 Pukul 16.08>
- futuredirections.org.au. 2020. *The chinese Distant Water Fishing Fleet and Illegal, Unreported and unregulated fishing*  
melalui  
<https://www.futuredirections.org.au/publication/the-chinese-distant-water-fishing-fleet-and-illegal-unreported-and-unregulated-fishing/>  
<19 November 2020 Pukul 14.49>
- Hasoloan, Jimmy. Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian. *Jurnal Ilmiah*

*Pendidikan Ekonomi*. Vol. 1 No. Hlm 102-112

*Administrasi Bisnis*. Vol. 34 No. 1 Hlm 114-121

Iuufishing.noaa.gov.2019. *Compliance Guide:U.S Seafood Import Monitoring Program*.  
<https://www.iuufishing.noaa.gov>

Shen Hui Hui, Shoulin Huang. 2021. China's Police and Practice to Combatting IUU in Distant Water Fisheries. *Aquaculture and Fisheries*.Vol 6. Hlm 27-34

Kontan.co.id. 2016. *Ingat, Skema Baru Ekspor Perikanan ke AS*.  
<https://industri.kontan.co.id/news/ingat-skema-baru-ekspor-perikanan-ke-as> <diakses pada 16 Juli 2021, 21.24>

Maritimnews.id. *Industri Perikanan Cina: Status, Kebijakan dan Prospeknya*  
<https://maritimnews.id/industri-perikanan-cina-status-kebijakan-dan-prospeknya/> <pada 18 November 2020 Pukul 14.39>

Mas'ood, Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta:LP3ES

Pramod, Ganapathi. 2014. Estimates of illegal and unreported fish in seafood imports to the USA. *Marine Police*. 48 hlm 102-113

International Trade Center

Robert Jakson dan Georg Sorens, 2013, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sedyaningrum, Miranti, dkk. Pengaruh Jumlah Nilai Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia. *Jurnal*